



Kapasitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kota Sukabumi

Gihan Pangestu*, Ike Rachmawati, Yana Fajar FY. Basori

Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

*gihanpangestu14@ummi.ac.id

Abstract

The increasing incidence of juvenile delinquency and violence against children in Sukabumi City has become a growing concern, particularly in cases of physical, psychological, and sexual abuse. Data from the Technical Implementation Unit for Women's Empowerment and Child Protection (UPT PPA) for 2022–2023 indicate a significant rise in reported cases and victims, challenging the institutional capacity of local government. This study aims to analyze the organizational capacity of the Women's Empowerment and Child Protection Agency (DP3A) of Sukabumi City in responding to this escalation. A qualitative descriptive approach was employed through observations, in-depth interviews with agency leaders, UPT PPA officers, experts, and social workers, supported by document analysis. The analysis is guided by Grindle's organizational capacity framework, which includes human resource development, organizational strengthening, and institutional reform. The findings reveal that DP3A demonstrates relatively adequate capacity in leadership, inter-sectoral coordination, and institutional commitment. However, these strengths are constrained by limited budget allocation, imbalance between workload and personnel, and reliance on externally driven training policies. This study contributes empirically by mapping local government institutional capacity in child protection governance within a public organizational context.

Keywords: Capacity Organization; Administration; Public Organization

Abstrak

Peningkatan kasus kenakalan remaja dan kekerasan terhadap anak di Kota Sukabumi menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, terutama pada kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Data Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT PPA) tahun 2022–2023 mencatat lonjakan signifikan jumlah laporan dan korban, yang menuntut kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Sukabumi dalam merespons peningkatan kasus tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam dengan pimpinan DP3A, petugas UPT PPA, tenaga ahli, dan pekerja sosial, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka kapasitas organisasi Grindle yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A memiliki kapasitas yang relatif memadai pada aspek kepemimpinan, koordinasi lintas sektor, dan komitmen aparatur. Namun, kapasitas tersebut masih dibatasi oleh keterbatasan anggaran, ketimpangan beban kerja dan jumlah personel, serta ketergantungan pada kebijakan pelatihan eksternal. Penelitian ini berkontribusi pada pemetaan empiris kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam tata kelola perlindungan anak berbasis organisasi publik.

Kata Kunci: Kapasitas Organisasi; Administrasi; Administrasi Publik

Pendahuluan

Fenomena kenakalan remaja dan kekerasan terhadap anak merupakan persoalan sosial yang menunjukkan kecenderungan peningkatan seiring dengan perubahan pola interaksi sosial, dinamika keluarga, serta pesatnya perkembangan teknologi informasi. Dalam perspektif administrasi publik, persoalan sosial tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dan pelaksana kebijakan. Administrasi pada dasarnya merupakan bentuk kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama melalui proses pengorganisasian dan pengendalian (Soekowaty, 2022). Secara etimologis, administrasi berakar pada makna pelayanan, sehingga setiap aktivitas administrasi pada hakikatnya ditujukan untuk melayani kepentingan masyarakat (Dimock, 1978).

Kenakalan remaja dan kekerasan terhadap anak yang berkembang menjadi tindakan serius seperti kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, perundungan (bullying), hingga perilaku melukai diri sendiri menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak lagi bersifat individual, melainkan telah menjadi masalah struktural. Dalam konteks administrasi publik, negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan berbagai informasi serta sumber daya agar pelayanan perlindungan anak dapat berjalan secara efektif (Silalahi, 2003). Selain itu, kegiatan administrasi yang bersifat perencanaan, pencatatan, dan pengoordinasian menjadi faktor penting agar tujuan organisasi publik dapat tercapai secara tertib dan efisien (The Liang Gie, 2022).

Secara normatif, Pemerintah Kota Sukabumi telah memiliki landasan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yang mengatur aspek pencegahan, penanganan, rehabilitasi, serta partisipasi masyarakat. Namun, meningkatnya jumlah dan ragam kasus menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi kebijakan. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan pada aspek kapasitas organisasi perangkat daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Sebagai organisasi publik, DP3A merupakan suatu bentuk perkumpulan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu (Siagian, 2014). Organisasi publik juga dipahami sebagai unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar dan berfungsi secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama (Robbins, 1994).

Tabel 1. Jumlah Kasus 2022-2023

NO	Kasus	Jumlah kasus 2022	Jumlah korban 2022	Jumlah kasus 2023	Jumlah korban 2023
1	Anak korban kekerasan fisik/psikis	10	10	12	12
2	Anak korban kejahatan seksual	13	17	20	32
3	Anak korban perlakuan salah/penelantaran	2	2	5	6
4	Anak korban perilaku social meyimang	1	1	-	-
5	Anak korban berhadapan dengan hukum	1	2	-	-
6	Anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan	1	1	-	-
7	Anak ingin pengakuan secara administratif	1	1	1	1
8	Anak berperilaku agresif	1	1	1	1
9	Perwalian hak anak	1	1	1	1
10	Anak korban bullying	-	-	8	8
11	Anak melukai diri sendiri	-	-	1	1
12	Anak korban stigma pelabelan	-	-	1	1

13	Lainnya	-	-	9	9
	JUMLAH	31	36	57	70

(Sumber data: Unit Pelayanan teknis Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Sukabumi, 2023)

Urgensi permasalahan ini tercermin dalam data empiris Kota Sukabumi. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Sukabumi, jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan signifikan, dari 31 kasus dengan 36 korban pada tahun 2022 menjadi 57 kasus dengan 70 korban pada tahun 2023. Peningkatan tersebut didominasi oleh kasus kejahatan seksual, kekerasan fisik dan psikis, serta munculnya kategori kasus baru seperti bullying, stigma pelabelan, dan gangguan perilaku agresif. Data ini tidak hanya menunjukkan bertambahnya jumlah kasus, tetapi juga meningkatnya kompleksitas permasalahan perlindungan anak di tingkat daerah. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kompleksitas permasalahan perlindungan anak yang harus ditangani oleh birokrasi pemerintah daerah. Dalam perspektif administrasi publik, birokrasi merupakan instrumen rasional yang memiliki kapasitas besar untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat modern (Muhammad, 2019). Selain itu, birokrasi yang ideal ditandai dengan pembagian kerja yang jelas, hierarki kewenangan, serta pelaksanaan tugas berdasarkan aturan dan prosedur yang seragam (Tjokroamidjojo, 1984).

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya menempatkan fokus pada faktor sosial, psikologis, atau aspek kebijakan dan hukum dalam menjelaskan fenomena kenakalan remaja dan kekerasan terhadap anak. Penelitian (Suwarlan et al, 2023), misalnya, menelaah pembangunan kapasitas organisasi pemerintah dalam konteks penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sementara itu, (Latif et al, 2022) menganalisis faktor penghambat pengembangan kapasitas kelembagaan DP3APM Kota Pekanbaru dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Meskipun relevan, sebagian besar studi tersebut belum secara spesifik mengkaji kapasitas organisasi DP3A dalam konteks implementasi kebijakan perlindungan anak dan penanganan kenakalan remaja di tingkat daerah. Berdasarkan celah tersebut, artikel ini menempatkan kapasitas organisasi sebagai variabel kunci dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Kapasitas dipahami sebagai kemampuan organisasi untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan output tertentu secara efektif (Hall et al., 2003). Pembangunan kapasitas tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan individu, tetapi juga pada penguatan sistem dan kelembagaan agar mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara berkelanjutan (Soeprapto, 2003). Oleh karena itu, fokus penelitian diarahkan pada kapasitas DP3A Kota Sukabumi, termasuk peran UPT PPA, dengan mengacu pada tiga dimensi kapasitas menurut (Grindle, 1997), yaitu pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Administrasi Publik, khususnya dalam pengembangan konsep kapasitas kelembagaan pemerintah daerah pada sektor perlindungan anak. Administrasi publik dipahami sebagai kerja sama institusi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien (Pasolong, 2019). Selain itu, penggunaan istilah administrasi publik penting untuk memperkuat identitas keilmuan yang berorientasi pada pelayanan kepentingan masyarakat luas (Meutia, 2017). Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Sukabumi dan DP3A dalam memperkuat kapasitas organisasi guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak serta menekan angka kenakalan remaja dan kekerasan terhadap anak.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menempatkan konteks alamiah sebagai latar kajian, dengan peneliti bertindak sebagai instrumen sentral dalam proses penggalian data (Sugiyono, 2005). yaitu suatu metode yang bertujuan menggali dan mendalami makna dari suatu isu sosial menurut perspektif individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya (Creswell, 2016). Dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis kapasitas kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Sukabumi dalam menangani peningkatan kasus kenakalan remaja dan kekerasan terhadap anak. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan dan berlokasi di DP3A serta Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT PPA). Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap empat informan kunci yang dipilih secara *purposive sampling*, yaitu pimpinan DP3A, kepala UPT PPA, pekerja sosial, dan tenaga ahli hukum, dengan kriteria keterlibatan langsung dan kewenangan dalam penanganan kasus. Data sekunder bersumber dari dokumen resmi, laporan kasus, arsip kelembagaan, dan peraturan daerah terkait. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dengan dukungan pedoman wawancara semi-terstruktur. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi antar informan, hasil observasi, dan dokumen (Moleong, 2017). Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2014) berdasarkan tiga dimensi kapasitas organisasi (Grindle, 1997) yaitu penguatan organisasi, pengembangan sumber daya manusia, dan reformasi kelembagaan, yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menjelaskan kapasitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada setiap dimensi, serta keterkaitan antar temuan yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan tahapan penyajian data. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan dan verifikasi untuk menilai Kapasitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian dengan didasari data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai Kapasitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kota Sukabumi. Deskripsi hasil penelitian tersebut meliputi beberapa dimensi, diantaranya yaitu:

1. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu dimensi penting dalam kapasitas organisasi sebagaimana dikemukakan oleh (Grindle, 1997) karena berpengaruh langsung terhadap kualitas implementasi kebijakan dan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pengembangan SDM di UPT PPA masih menghadapi berbagai keterbatasan, khususnya terkait relevansi dan intensitas pelatihan, jumlah personel, serta dukungan kelembagaan. Meskipun aparatur dan tenaga ahli tetap berupaya menjaga kualitas layanan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan SDM belum sepenuhnya menjadi sistem yang terstruktur dan berkelanjutan.

Pelatihan yang diterima aparatur dan tenaga ahli umumnya diselenggarakan oleh dinas, pemerintah provinsi, atau kementerian dengan frekuensi terbatas dan cenderung berfokus pada aspek administratif. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara materi pelatihan dan kebutuhan riil di lapangan, terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang bersifat kompleks dan multidimensional.

Dalam perspektif Grindle, kondisi ini mengindikasikan bahwa proses peningkatan kompetensi belum sepenuhnya menyesuaikan tuntutan kebijakan dan dinamika pelayanan, sehingga aparatur lebih banyak mengandalkan pengalaman kerja dan pembelajaran mandiri.

Keterbatasan anggaran dan kewenangan organisasi turut memengaruhi efektivitas pengembangan SDM di UPT PPA. Unit pelaksana tidak memiliki fleksibilitas untuk menyelenggarakan pelatihan secara mandiri karena harus mengacu pada kebijakan BKPSDM. Dalam kerangka teori (Grindle, 1997) keterbatasan sumber daya finansial dan kelembagaan ini secara langsung membatasi kemampuan organisasi dalam meningkatkan kapasitas aparatur, terutama dalam merespons kebutuhan kompetensi yang bersifat mendesak dan kontekstual.

Selain itu, keterbatasan jumlah personel menjadi tantangan internal yang signifikan. Tingginya intensitas penanganan kasus, terutama ketika beberapa kasus harus ditangani secara bersamaan, meningkatkan beban kerja aparatur dan tenaga ahli. Kondisi ini berpotensi menghambat proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Menurut (Grindle, 1997) lingkungan kerja yang tidak mendukung pembelajaran organisasi dapat membatasi peningkatan kapasitas aparatur, meskipun individu memiliki komitmen dan profesionalisme yang tinggi.

Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, penelitian ini menemukan adanya faktor pendukung berupa kepemimpinan yang responsif dan komitmen moral aparatur dalam menjalankan pelayanan publik. Dukungan pimpinan dan profesionalisme individu memungkinkan layanan tetap berjalan sesuai prosedur meskipun sistem pengembangan SDM belum optimal. Namun demikian, temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM di UPT PPA masih lebih bertumpu pada kualitas individu dan kepemimpinan, bukan pada sistem kelembagaan yang kuat, sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan dukungan struktural agar pengembangan SDM dapat berjalan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

2. Penguatan Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, penguatan organisasi di UPT PPA masih berada pada kondisi yang belum sepenuhnya optimal. Secara formal, struktur organisasi, sistem kerja, serta mekanisme koordinasi telah tersedia dan berjalan, namun kapasitas struktural organisasi masih terbatas. Keterbatasan tersebut terutama terlihat pada aspek anggaran dan jumlah personel, yang berdampak langsung terhadap pengembangan kapasitas sumber daya manusia, perluasan jangkauan layanan, serta keberlanjutan kualitas pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun fondasi organisasi telah terbentuk, efektivitas pelaksanaan pelayanan masih sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang dimiliki.

Dalam perspektif teori (Grindle, 1997) penguatan organisasi menekankan kemampuan institusi dalam mengelola sumber daya, memperkuat struktur dan sistem kerja, serta memastikan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UPT PPA telah memiliki sistem kerja yang relatif jelas, seperti mekanisme pelaporan, koordinasi internal, serta forum manajemen kasus yang berfungsi untuk memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing tenaga ahli. Hal ini mencerminkan adanya upaya penguatan organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Grindle. Namun demikian, efektivitas sistem tersebut masih sangat bergantung pada kapasitas sumber daya organisasi, sehingga belum sepenuhnya mampu menopang pelaksanaan kebijakan secara stabil.

Hasil reduksi data dari wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala UPT PPA, tenaga ahli, dan pekerja sosial

menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi temuan sentral dalam dimensi penguatan organisasi. Keterbatasan anggaran menghambat pelaksanaan pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas organisasi secara menyeluruh. Dalam kerangka Grindle, keterbatasan sumber daya finansial merupakan faktor utama yang melemahkan kapasitas organisasi karena membatasi ruang pengembangan sistem, peningkatan kualitas SDM, dan perluasan jangkauan layanan. Untuk menyiasati kondisi tersebut, UPT PPA mengadopsi strategi adaptif melalui optimalisasi media sosial, platform daring, serta kerja sama dengan stasiun radio sebagai sarana sosialisasi berbiaya rendah. Strategi ini menunjukkan bahwa penguatan organisasi lebih banyak dilakukan melalui inovasi dan kreativitas dibandingkan penguatan struktural yang ideal.

Selain keterbatasan anggaran, penelitian ini juga menemukan adanya ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah personel, terutama ketika terjadi lonjakan kasus yang tidak dapat diprediksi. Kondisi ini menyebabkan distribusi penanganan kasus menjadi tidak merata dan meningkatkan tekanan kerja petugas. Dalam perspektif Grindle, situasi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas organisasi belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan. Meskipun prosedur dan struktur kerja telah tersedia, keterbatasan personel membuat organisasi sangat bergantung pada kapasitas individu dalam mengatur waktu dan menentukan prioritas penanganan kasus. Namun demikian, budaya kerja saling mendukung dalam tim, yang diperkuat melalui forum manajemen kasus, menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan adanya kapasitas adaptif organisasi yang relatif kuat, terutama melalui peran kepemimpinan dan strategi kolaborasi lintas sektor. Pimpinan UPT PPA dinilai mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana dalam menghadapi keterbatasan sumber daya, serta memberikan teladan empatik dan humanis kepada bawahan dalam melayani korban. Kepemimpinan yang efektif ini menjadi penyangga utama keberlangsungan organisasi, sejalan dengan pandangan (Grindle, 1997) bahwa kepemimpinan merupakan bagian integral dari penguatan organisasi. Selain itu, koordinasi aktif dengan berbagai instansi internal maupun eksternal serta efektivitas komunikasi organisasi, baik melalui pelaporan langsung maupun hotline, menunjukkan bahwa UPT PPA telah membangun jejaring kerja yang terintegrasi. Meskipun penguatan organisasi belum optimal secara struktural, kapasitas adaptif, kepemimpinan, dan kolaborasi lintas sektor memungkinkan UPT PPA tetap memberikan layanan secara responsif dan profesional.

3. Reformasi Kelembagaan

Berdasarkan hasil analisis pada tahap reduksi dan penyajian data, penelitian ini menemukan bahwa reformasi kelembagaan dalam penyelenggaraan layanan UPT PPA telah berjalan, namun belum sepenuhnya terinstitusionalisasi secara formal. Reformasi tersebut tercermin melalui penguatan koordinasi lintas instansi, pengembangan jejaring kerja, mekanisme monitoring dan evaluasi layanan, serta penyesuaian peran kelembagaan dalam merespons dinamika sosial masyarakat. Dalam perspektif teori (Grindle, 1997) reformasi kelembagaan tidak hanya mencakup perubahan struktur formal, tetapi juga transformasi cara kerja dan budaya organisasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UPT PPA telah melakukan reformasi kelembagaan secara fungsional, meskipun implementasinya masih sangat bergantung pada praktik kerja sehari-hari, komunikasi informal, dan inisiatif aktor kelembagaan.

Koordinasi lintas instansi menjadi temuan utama dalam dimensi reformasi kelembagaan. UPT PPA secara aktif berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, kepolisian, serta lembaga peradilan dalam menangani kasus

kekerasan terhadap perempuan dan anak. Koordinasi ini memungkinkan penanganan kasus dilakukan secara komprehensif, bahkan ketika laporan belum masuk ke ranah hukum. Dalam kerangka teori Grindle, kondisi ini mencerminkan penguatan jejaring kerja horizontal antar lembaga sebagai bentuk reformasi kelembagaan. Namun, ketiadaan pengaturan formal seperti nota kesepahaman (MoU) menunjukkan bahwa reformasi tersebut masih bersifat informal dan sangat bergantung pada komitmen personal serta hubungan antar aktor, sehingga berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap keberlanjutan layanan.

Temuan lain yang menonjol adalah kendala dalam penyinkronan waktu dan agenda antar instansi mitra. Setiap lembaga memiliki prioritas dan keterbatasan sumber daya masing-masing, yang kerap menghambat koordinasi dalam penanganan kasus. Dalam perspektif Grindle, kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan belum sepenuhnya mampu menyelaraskan mekanisme kerja lintas sektor. Meskipun demikian, UPT PPA menunjukkan kemampuan adaptif melalui pemanfaatan media komunikasi digital seperti WhatsApp untuk menjaga intensitas koordinasi. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi kelembagaan lebih berkembang pada aspek prosedural dan komunikasi, dibandingkan perubahan struktural yang bersifat permanen.

Reformasi kelembagaan juga tercermin melalui upaya memperluas jejaring kerja hingga ke tingkat kelurahan dan kecamatan, yang dinilai strategis karena paling dekat dengan masyarakat. Upaya ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam kerangka teori Grindle, temuan ini menunjukkan perluasan fungsi kelembagaan UPT PPA sebagai agen perubahan sosial. Namun demikian, efektivitas reformasi ini masih dibatasi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, kuatnya stigma sosial, serta norma budaya yang memandang kekerasan sebagai persoalan privat. Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi layanan telah dilakukan melalui penilaian jumlah kasus, keberlanjutan pendampingan, serta evaluasi pasca-intervensi, meskipun masih terbatas dalam menilai aspek non-fisik seperti perkembangan psikologis klien yang memerlukan rujukan tenaga ahli.

Kapasitas kelembagaan berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan UPT PPA, namun dukungan tersebut masih bersifat parsial. Reformasi kelembagaan telah berjalan secara fungsional, tetapi belum kokoh secara struktural. Implikasi kebijakan dari temuan ini menegaskan pentingnya institusionalisasi koordinasi lintas sektor melalui regulasi atau MoU yang jelas, penguatan sumber daya manusia melalui sistem pelatihan berkelanjutan yang terstandar, serta peningkatan alokasi pendanaan yang stabil. Selain itu, diperlukan strategi penguatan peran wilayah kelurahan dan kecamatan sebagai simpul layanan awal, serta integrasi mekanisme evaluasi yang lebih komprehensif untuk memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Sukabumi dalam mengatasi kenakalan remaja melalui UPT PPA secara umum telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek koordinasi lintas sektor, kepemimpinan, dan komitmen aparatur. Namun demikian, kapasitas tersebut belum sepenuhnya terlembagakan secara sistemik sebagaimana dikemukakan dalam teori kapasitas organisasi Grindle. Keterbatasan anggaran, ketimpangan beban kerja akibat kekurangan personel, serta pengembangan sumber daya manusia yang masih bergantung pada kebijakan eksternal menjadi faktor utama yang membatasi efektivitas penguatan

organisasi. Selain itu, reformasi kelembagaan masih berlangsung secara adaptif dan informal, sehingga belum mampu mendorong perubahan struktural dalam pola kerja dan norma kelembagaan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas DP3A ke depan perlu diarahkan pada dukungan kebijakan dan anggaran yang lebih memadai, pengembangan sumber daya manusia yang terencana dan berkelanjutan, serta penguatan kerja sama formal lintas instansi dan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanganan kenakalan remaja di tingkat lokal.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Los Angeles, CA: SAGE Publications.
- Dimock, M., & Dimock, E. (1978). *Administrasi Negara*. Jakarta, Indonesia: Aksara Baru.
- Mustiqowati, F. (2021). *Dasar-Dasar Teori Organisasi*. Pekanbaru, Indonesia: iRdev Riau Institute for Research and Development.
- Grindle, M. S. (Ed.). (1997). *Getting Good Government: Capacity Building In The Public Sectors Of Developing Countries*. Cambridge, MA: Harvard Institute for International Development.
- Hall, R. H. (2003). *Organisasi: Struktur, Proses, & Output*. Jakarta, Indonesia: Prenhallindo.
- Haryono, B. S., Zauhar, S., & Supriyono, B. (2012). *Capacity Building*. Malang, Indonesia: Universitas Brawijaya Press.
- Latif, S. A., & Dewi, Y. Y. (2022). Analisis Faktor Penghambat Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Di Dinas P3APM Kota Pekanbaru Pada Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dan Pemberdayaan Perempuan. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 171–180.
- Meutia, I. F. (2017). *Reformasi Administrasi Publik*. Bandar Lampung, Indonesia: AURA CV Anugrah Utama Raharja.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2019). *Pengantar Administrasi Negara*. Lhokseumawe, Indonesia: UNIMAL Press.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Indonesia: CV Alfabeta.
- Robbins, S. P. (1994). *Teori Organisasi: Struktur, Desain, Dan Aplikasi*. Jakarta, Indonesia: Arcan.
- Siagian, S. P. (2014). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, Dan Strateginya*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.
- Silalahi, U. (2003). *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori, Dan Dimensi*. Bandung, Indonesia: Sinar Baru Algensindo.
- Soekowaty, A. M. (2022). *Filsafat Administrasi*. Semarang, Indonesia: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
- Soeprapto, R. (2003). *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah*. Malang, Indonesia: Averroes Press.
- Suwarlan, E., Suparman, A. N., & Taufik, O. H. (2023). Pembangunan Kapasitas Dinas Komunikasi Dan Informatika Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 11(1), 98–116.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.

The Liang Gie. (2022). *Etika Administrasi Pemerintahan* (3rd ed.). Tangerang Selatan, Indonesia: Universitas Terbuka.

Tjokroamidjojo, B. (1984). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta, Indonesia: LP3ES.